

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Rendahnya Partisipasi Politik Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di negara Hong Kong dengan jumlah pemilih sebanyak 181.014 daftar pemilih tetap sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 46.510 suara. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi dari pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong walaupun jumlah ini ada kenaikan dari pemilihan umum tahun 2014. Rendahnya partisipasi politik ini tidak bisa disalahkan ke pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong begitu saja akan tetapi banyak faktor yang melatarbelakanginya. Sejumlah kendala terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Hong Kong sehingga mempengaruhi partisipasi politik pekerja migran Indonesia, diantaranya:

1. Dokumen seperti paspor ditahan oleh majikan maupun agen pada akhirnya calon pemilih tidak bisa mencoblos karena tidak memenuhi persyaratan.
2. Durasi waktu yang terbatas sehingga pemilih yang masuk daftar pemilih khusus tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
3. Konstituen tidak mendaftar melalui sistem online pada sebelum pelaksanaan, disebabkan karena konstituen takut dokumen yang sudah diunggah ke sistem akan disalahgunakan.

4. Bagi konstituen yang sudah terdaftar melalui sistem pos akan tetapi surat suaranya kembali (retur) bisa saja tidak mampu menggunakan hak pilihnya ini semua terjadi karena minimnya sosialisasi.

Antusiasme bagi calon pemilih tidak diimbangi dari panitia pemilihan luar negeri, contohnya adalah masalahantisipasi terkait daftar pemilih khusus. Tidak adanya langkah dari panitia untuk memilah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus diantrian terluar, sehingga calon pemilih dari daftar pemilih khusus yang sudah mengantri lama harus menunggu lama dan melalui mekanisme baru. Mekanismenya adalah pemilih keluar dulu dari antrian sembari menunggu waktu yang telah ditentukan tiba¹⁷. Ini berdampak pada partisipasi politik pekerja migran yang ada di Hong Kong. Disamping masalah dokumen dan juga waktu ada hal lain yang terjadi saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong adalah sosialisasi. Sosialisasi ini disini sangat berperan penting, tidak hanya sosialisasi tentang pencoblosan dan juga tempat pencoblosan tetapi juga sosialisasi tentang pemilih yang menggunakan sistem pos.

Dalam pemungutan suara pendahuluan di Hong Kong banyak sekali pekerja migran Indonesia tidak mampu menjalankan hak pilihnya dikarenakan antrian yang begitu panjang, selain itu layanan di tempat pemungutan suara sangat lamban sehingga pekerja migran Indonesia yang mempunyai hak pilih terpaksa meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara karena harus kembali bekerja.

¹⁷ Yasinta Veronika, "Migrant Care Temukan Ada 4 Kendala Pemilu 2019 di Hong Kong," Kompas.com, April 14, 2019, <https://www.merdeka.com/trending/cara-penulisan-footnote-lengkap-beserta-contoh-pahami-aturannya-pula-klm.html#:~:text=Cara%20Penulisan%20Footnote%20dari%20Internet&text=Nama%20depan%20Openulis%20nama%20belakang%2C%20%22Judul%20Halaman%2C%22%20Judul,%22Judul%20Halaman%20yang%20Dipersingkat.%22>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2022.

Kendala lain yang dirasakan adalah masalah penahanan dokumen oleh majikan maupun agen pada akhirnya mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Selain itu ada masalah lain yang ada didalam penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri yaitu tidak adanya pengawasan atau pemantauan dalam proses pemungutan suara melalui metode kotak suara keliling dan pos atau surat. Kalau merujuk pada aturan bahwa semua itu demi memastikan bahwa mekanisme khusus yang dijalankan untuk pemilih luar negeri tersebut tetap menjamin proses pemungutan suara pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil¹⁸. Ini sangat miris sekali, disatu sisi pemerintah Indonesia untuk mengadakan pemilihan umum ini didukung dengan banyak anggaran akan tetapi disisi lain, pelaksanaan dilapangan sangatlah mengecewakan serta mengorbankan hak pilih warga negara.

Selain faktor yang sudah dijelaskan diatas ada juga faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik. Dimana, sosialisasi untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum dan lembaga-lembaga pemerhati pemilihan umum di Indonesia menyasar kelompok tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui pendidikan politik dalam berbagai forum, sosialisasi dan pelatihan hanya melibatkan orang atau kelompok itu-itu saja sehingga terjadi perilaku pasif terhadap ketidakmauan untuk berpartisipasi dalam politik dalam memilih Presiden dan

¹⁸ Susilo, Wahyu. "Problematik Pemungutan Suara Pendahuluan di Luar Negeri". *MediaIndonesia.com*. April 17, 2019. <https://m.mediaIndonesia.com/read/detail/230110-problematik-pemungutan-suara-pendahuluan-di-luar-negeri.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pertama, kurang maksimal dalam sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih warga negara Indonesia di luar negeri oleh penyelenggara panitia pemilihan luar negeri. Kedua, tidak tersedianya data yang pasti dan juga memadai mengenai keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri pada akhirnya panitia pemilihan luar negeri tidak mempunyai landasan untuk mengakurasi daftar pemilih tetap di luar negeri. Sering kali warga negara Indonesia dibuat kecewa oleh panitia pemilihan luar negeri dengan banyak kerumitan aturan yang sangat menghambat (*bottle necking*), ketika pemilih sudah siap menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum pendahuluan. Harusnya penyelenggara pemilihan umum Indonesia yang berada di luar negeri memiliki kepedulian terhadap karakter-karakter pemilih yang berada di luar negeri yang sedikit berbeda dengan para pemilih di Indonesia seperti di Hong Kong, kebebasan para pemilih dibatasi dengan jam kerja atau hari libur serta harus izin dari majikan.

4.2 Tingginya Partisipasi Politik Menurut Hasil Survey

Pada tanggal, 14 April 2019 di Hong Kong diselenggarakan pemungutan suara lebih awal (*early voting*). Antusiasme para pekerja migran Indonesia mulai dari antrian sudah terlihat. Peningkatan partisipasi oleh pekerja migran Indonesia sudah diprediksi sebelumnya. Ini terlihat saat pemuktahiran daftar pemilih tetap yang direkap oleh panitia pemilihan luar negeri. Panitia penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan, ini merupakan pemilihan umum terbesar yang pernah diadakan di Hong Kong. Secara umum ini bisa menjadi sebuah alat

pendidikan politik bagi masyarakat Hong Kong, sedangkan secara khusus untuk pekerja migran Indonesia. Terselenggaranya pemilihan umum Indonesia di luar negeri ini bisa menampilkan wajah demokrasi negara Indonesia di level dunia. Meskipun himbauan kepada pekerja migran Indonesia yang pindah majikan dan pindah alamat untuk secepatnya memberitahu atau melapor serta untuk memperbarui data sudah dilakukan, sosialisasi dan pemuktahiran data oleh panitia pemilihan luar negeri di Hong Kong dilakukan sejak 6 bulan lalu, akan tetapi masih banyak terjadi surat suara yang kembali (retur).

Bagi pekerja migran Indonesia yang sudah menjadi calon pemilih dan telah terdaftar melalui mekanisme pos, namun surat suaranya kembali ini berakibat pada terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mengingat sangat minimnya informasi. Pekerja migran Indonesia yang terdaftar dan memberikan hak suaranya melalui mekanis pos banyak yang mendatangi tempat pemungutan suara saat pencoblosan untuk ikut berpartisipasi politik. Banyak pekerja migran Indonesia yang mengatakan bahwa tidak menerima surat suara melalui mekanisme pos, tapi mereka mau menyalurkan hak suaranya melalui tempat pemungutan suara akan tetapi tidak bisa. Ada 3 pemilih yang masuk dalam mekanisme pos akan tetapi datang ke tempat pemungutan suara dan membawa surat suara dengan mengaku tidak mempunyai waktu untuk mengirimkan kembali lewat pos. Panitia pemilihan memberi ijin kepada yang bersangkutan untuk mencoblos surat suaranya di salah satu tempat pemungutan suara dan dimasukkan ke kotak tersendiri¹⁹. Permasalahan seperti ini

¹⁹ Evi Zulvani, "Ini Dia Ragam Tantangan Penyelenggaraan Pemilu di Hongkong," migrantcare.net, April 14, 2019, <https://migrantcare.net/2019/04/ini-dia-ragam-tantangan-penyelenggaraan-pemilu-di-hongkong/> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

terjadi disetiap penyelenggaraan pemilihan umum harusnya pemerintah dan juga panitia diluar negeri di Hong Kong bisa belajar dari pengalaman untuk memperbaiki semua ini.

Survey yang dilakukan peneliti mengambil 100 responden dengan 82 persen responden menggunakan hak politiknya sedangkan yang 18 persen tidak menggunakan hak politiknya. Tingginya partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mempunyai beberapa sebab. Pertama, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong sadar akan politik. Ikut serta dalam kegiatan kampanye merupakan bagian dari politik. Selanjutnya pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong juga membikin dan bergabung disebuah kelompok atau menjadi tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mereka dukung. Maksud dan tujuan bergabung ke tim sukses adalah pasangan calon yang didukung supaya menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Antusiasme pekerja migran Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya terlihat dari antrian yang mengular begitu panjang dilokasi pemungutan suara, sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Partisipasi dalam berpolitik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam demokrasi. Asumsi dasar dari demokrasi adalah orang yang paling mengetahui tentang apa dan bagaimananya untuk dirinya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dirumuskan dan dikerjakan oleh pemerintah meliputi sebuah kehidupan rakyatnya. Warga negara mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang akan diambil yang mana kelak bisa mempengaruhi hidupnya. Dengan kalimat

lain keikutsertaan rakyat dalam mempengaruhi proses perumusan keputusan dan pelaksanaan politik sangat dibutuhkan agar terciptanya sebuah keputusan yang tidak merugikan banyak pihak terutama untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Sakti, 2012:63). Partisipasi memperlihatkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami terkait masalah politik serta mau atau ingin melibatkan diri sendiri didalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kebalikannya adalah dengan angka partisipasi yang terbilang minim pada umumnya dianggap sebagai tanda-tanda yang tidak baik, karena bisa diterjemahkan bahwa banyak rakyat yang tidak menaruh harapan dan juga perhatian kepada bangsa serta negara.

Partisipasi politik bisa saja berbentuk pemberian hak suara saat pemilihan umum berlangsung. Masyarakat disini turut serta berkontribusi atau turut andil dalam memberi dukungan yang berbentuk pemberian suara kepada calon pemimpin maupun partai politik. Dalam survey ditunjukkan bahwa antusiasme pekerja migran Indonesia dalam berpartisipasi politik tidak terlepas dari figur calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pekerja migran Indonesia tidak memperhatikann jarak maupun status mereka sendiri dalam partisipasi politik, yang mereka pikirkan itu untuk kemajuan bangsa dan negara.

Selain faktor personal juga tidak bisa dilepaskan oleh faktor dukungan dari pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Konsulat Jendral Republik Indonesia. Konsulat Jendral Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran kepada para majikan maupun agen penyaluran pekerja migran Indonesia berbentuk dalam tiga bahasa yaitu bahasa Kanton, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Maksud dan

tujuan dari surat edaran tersebut adalah pemberian izin untuk pekerja migran Indonesia dan memberikan paspornya untuk bisa ikut menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara maupun melalui surat suara yang dikirimkan lewat pos. Meskipun tidak diatur secara jelas dalam aturan ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang berada di Hong Kong, sudah menjadi kebiasaan bagi majikan maupun agen untuk menahan paspor para pekerja migran Indonesia. Sedangkan paspor tersebut digunakan sebagai syarat bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong yang ingin mendapatkan surat suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Rasa was-was atau takut bagi pekerja migran Indonesia untuk meminta paspornya hilang begitu saja dengan adanya surat edaran dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jendral Republik Indonesia.